

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 butir 1, Potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan lain yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, harus dikembangkan secara aktif oleh peserta didik. Dengan demikian, setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang baik karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri.

Karena pendidikan tidak dapat memenuhi tujuannya jika ia memisahkan diri dari lingkungannya, itu adalah kebijakan mendasar yang paling esensial yang bersifat terbuka. Pendidikan berada dalam masyarakat dan merupakan miliknya. Pemerintah menekankan bahwa pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat semuanya bertanggung jawab terhadap pendidikan. Oleh karenanya keberadaan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat¹.

Karena kesadaran masyarakat di pedesaan masih rendah terhadap pendidikan formal dan nonformal, Akibatnya, sebagian besar penduduk masih belum melampaui standar sekolah menengah pertama (SMP). Oleh karena itu, mereka memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pendidikan. Hal Ini salah satunya disebabkan oleh keadaan ekonomi.

Pemerintah berupaya serius menangani berbagai persoalan di bidang pendidikan karena sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga harga diri bangsa. Penyediaan penjangkauan keuangan yang signifikan adalah salah satu cara untuk menangani fokus ini. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pendidikan Nonformal merupakan dua inisiatif yang harus terus dilanjutkan guna

¹ Yanzi Permata, Holilulloh, "*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Di Desa Cugung*", Jurnal Kultur Demokrasi, 3.7 (2015): 10.

meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan di semua jenjang. Salah satu inisiatif pemerintah yang terus berlanjut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang telah diujicobakan di tujuh provinsi dan 48 kabupaten atau kota pada tahun 2007 sebelum diimplementasikan secara nasional di Indonesia pada tahun 2012. PKH diyakini dapat mengatasi permasalahan sosial kemiskinan dan kemiskinan². 9,57 % penduduk miskin pada September 2022, naik 0,03% dari Maret 2022 dan turun 0,14% dari September 2021. Dengan kenaikan 0,20 juta dari Maret 2022 dan penurunan 0,14 juta dari September 2021, jumlah total orang miskin adalah 26,36 juta pada September 2022. Pada Maret 2022, proporsi masyarakat kurang mampu di perkotaan sebesar 7,50% pada September 2022, angka tersebut meningkat menjadi 7,53%. Sementara itu, proporsi penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 12,29% pada Maret 2022 menjadi 12,36% pada September 2022.

PKH merupakan Salah satu program bantuan subsidi dari pemerintah program bantuan ini diberikan dalam upaya perlindungan sosial terhadap kelompok keluarga berpenghasilan sangat rendah dan anggota keluarga yang telah memenuhi syarat yang khususnya difokuskan kepada bantuan pendidikan dan kesehatan. yang berhak mendapatkan PKH adalah rumah tangga Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, serta mereka yang hamil, menyusui, atau memiliki anak di bawah 11 tahun, bersekolah di sekolah dasar, menengah, atau atas dan orang tua lanjut usia (60 tahun ke atas). Tujuan PKH adalah memutus lingkaran kemiskinan dengan meningkatkan akses ke pendidikan dan bentuk modal manusia lainnya dan mengubah sudut pandang yang mencegah peningkatan standar hidup orang yang kurang beruntung. Bagi mereka yang telah terdaftar sebagai anggota PKH, PKH secara tegas berupaya meningkatkan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan di masyarakat³.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana untuk sekolah non-formal melalui program pemerintah Desa. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana untuk sekolah nonformal dari

² BPS Presentasi penduduk miskin, Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2022, 07, 2023.

³ Pemensos RI, *Program Keluarga Harapan (PKH), Indonesia* No,1,3. 2018.Hal 1–35.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk dana pembangunan (DIP) dan dana rutin (DIK)⁴. Pengelolaan pendanaan pendidikan adalah tanggungjawab bersama-sama khususnya pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan dana Desa untuk lembaga pendidikan nonformal, pemanfaatan dana tersebut diantaranya pemberian insentif kepada pengajar dan perbaikan sarana prasarana sekolah nonformal.

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemandirian dan kekuatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghadapi tuntutan di berbagai bidang kehidupan. Opini pemberdayaan penduduk desa dapat dilihat dari dua sudut pandang. pemberdayaan membuat masyarakat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan luar, melainkan berperan aktif secara otonom. Bertindak secara otonom tidak membebaskan negara dari tanggung jawabnya. Ketika negara menawarkan layanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, negara memenuhi tugas atau kewajibannya⁵.

Hingga 2019, ada 8260 penduduk yang tinggal di sana. Masyarakat Desa Sukamanah memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah, dengan mayoritas keluarga bermata pencaharian sebagai petani dengan taraf pendidikan masyarakat yang cukup rendah. Dalam pemendagri pasal 1 ayat 2 yaitu Kepala desa bertugas menyelenggarakan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat⁶.

Pemerintah Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat memiliki kekhawatiran terhadap pendidikan masyarakatnya oleh sebab itu Pemerintah Desa menyodorkan pemberdayaan guna mendorong atau membantu masyarakatnya khususnya masyarakat yang membutuhkan untuk mendapat bantuan pemerintah, dimana Pemerintah Desa berusaha untuk mendata seakurat mungkin terkait calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Bantuan yang

⁴ Warni Arwildayanto, Nina, *Managemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : Widya Padjajaran, 1st edn, 2017). H 3

⁵ Sutoro Eko and others, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)).

⁶ Pemendagri No.84 Tahun, *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*, (2015).

diberikan Pemerintah melalui Pemerintah Desa berusaha untuk menaikkan kesejahteraan warga dalam poin pendidikan. Bisa melalui bantuan PKH dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak pembimbing PKH bahwa, setiap Dusun dan Kampung di Desa Sukamanah menjadi bagian dari bantuan PKH dengan jumlah 463 kepala keluarga dengan 375 orang penerima bantuan PKH dalam bidang pendidikan (Hasil wawancara peneliti dengan pembimbing PKH pada tanggal 9 maret 2023 di Desa Sukamanah).

Selain memperhatikan masyarakatnya, Pemerintah Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat juga memperhatikan sarana prasarana dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintah desa bahwa terdapat sembilan sekolah non-formal yang telah dibangun, dan pemberian insentif kepada tenaga pengajar sekolah nonformal diantaranya terdapat 192 orang guru ngaji dan 109 orang guru RA, Kober, PAUD, TPQ dan MDT di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. bantuan ini diberikan persatu tahun sekali dan program ini sudah berjalan selama 4 tahun⁷.

Dari upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendidikan yang telah di jalankan, masyarakat penerima bantuan di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat ini dalam pemanfaatan dana tersebut sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari menurunnya angka putus sekolah akibat masalah biaya. Dana pendidikan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli buku, seragam, tas, sepatu, dan alat-alat pendukung pendidikan lainnya, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Meningkatnya sarana prasarana sekolah non-formal yang sudah di bangun dan di perbaiki oleh Pemerintah Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat sehingga peserta didik dan pengajar lebih terjamin kenyamanan dalam belajar, serta pengajar sekolah non-formal mendapat insentif guna sedikitnya membantu biaya hidupnya sehari - hari.

Demikian itu tentu menjadi suatu keberhasilan dari upaya yang telah pemerintah jalankan, terlihat bahwa masyarakat sangat antusias dengan program

⁷ Saeful Rohman (kasi Pemberdayaan), hasil wawancara, Sukamanah 9 maret 2023.

bantuan pendidikan yang telah di upayakan Pemerintah Desa, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan oleh masyarakat penerima bantuan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat terlaksana dengan baik. Dan keberhasilannya bisa dilihat dari pendidikan masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat ini lambat laun meningkat sehingga sumberdaya manusia di desa tersebut semakin meningkat pula.

Berdasarkan penjelasan dari masalah yang melatarbelakangi Peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya pemerintah mengenai: *pertama*, pendidikan masyarakat *Kedua*, faktor penyebab rendahnya pendidikan masyarakat desa *Ketiga*, program pemerintah desa dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendidikan masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa faktor penyebab rendahnya pendidikan masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana bantuan dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Melalui Rumusan Masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

3. Untuk mengetahui jenis bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Mengikuti konsep dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, keuntungan berikut dapat dicapai dari temuan penelitian:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data empiris untuk ilmu sosial, khususnya sosiologi. Penelitian ini berfokus pada evaluasi sosiologis pendidikan sebagai referensi untuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Untuk lembaga, sebagai bahan evaluasi terhadap peningkatan program pendidikan.
- b. Untuk masyarakat, sebagai pengetahuan tambahan dalam peningkatan pengimplementasian bantuan pendidikan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji pendidikan masyarakat dimana kebutuhan mendasar yang paling krusial yang belum terpenuhi adalah pendidikan karena jika ia memisahkan diri dari lingkungannya, pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan adalah bagian dari dan produk masyarakat. Pemerintah mengutamakan gagasan bahwa setiap orang tua, guru, dan anggota masyarakat memiliki kepentingan dalam pendidikan anak. Masyarakat diimbau untuk menyelesaikan sekolahnya sesuai anjuran pemerintah. Masalahnya, masyarakat pedesaan mayoritas hanya berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), sehingga pengetahuan yang mereka miliki sangatlah terbatas. Yang mana kesadaran terhadap pendidikan baik formal maupun non-formal masih rendah, salah satunya karena kondisi ekonomi keluarga. Pemerintah telah mengadopsi sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, seperti

halnya yang terjadi pada Masyarakat Desa Sukamanah di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

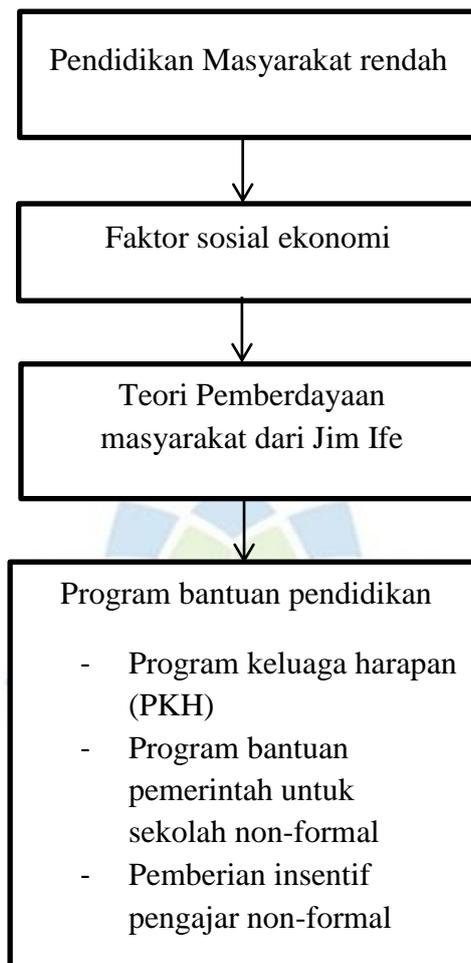
Fenomena ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Pemerintah Desa karena secara tidak langsung nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife (1997), Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatur masa depan serta berperan aktif dalam memengaruhi kehidupan di komunitasnya⁸. Menurut Jim Ife, ada tiga pilihan yang tersedia untuk pemberdayaan masyarakat. Pertama, pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dengan menciptakan atau mengubah organisasi dan struktur yang menawarkan akses yang adil terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk terlibat. Kedua, perolehan kekuasaan yang efektif melalui pertarungan politik dan gerakan yang menggabungkan aksi sosial dan politik. Ketiga, pemberdayaan melalui pembangunan kesadaran dan pengetahuan, yang dicapai melalui proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Oleh sebab itu Pemerintah Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat berupaya merencanakan pemberdayaan berupa bantuan yang di butuhkan masyarakat khususnya berupa bantuan pendidikan baik penyodoran program bantuan yang sudah ada dari pemerintah pusat (program nasional) atau program dari pemerintah desa itu sendiri, lalu pemerintah mendorong atau membantu masyarakatnya khususnya masyarakat yang membutuhkan guna mendapat bantuan pendidikan, dimana Pemerintah Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat berupaya untuk mendata seakurat mungkin terkait calon penerima bantuan. Tujuan Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Desa ini berupa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Yaitu melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya dalam bidang pendidikan dimana bantuan ini di serahkan kepada masyarakat itu sendiri,

⁸ Ife, Jim, *Pembangunan Masyarakat: Analisis dan Praktik*, diterjemahkan oleh Taufik Rohman, (Jakarta: CFMS, 1996). H 35.

Selain memperhatikan masyarakatnya, Pemerintah Desa Sukamanah juga memperhatikan sarana prasarana dan tenaga pengajar sekolah nonformal yang ada.

Kondisi ini membuat peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana upaya Pemerintah Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan pendidikan masyarakatnya, berkenaan dengan uraian diatas maka bagan pikir digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Konseptual pemikiran

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Desa berupaya meningkatkan pendidikan masyarakatnya yang dimana pendidikan masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat ini mayoritas bertaraf pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) hal ini tentu saja di latarbelakangi oleh sosial ekonomi yang kurang.